

Integrasi Aspek Perlindungan Migran Dalam Kebijakan Desa Suralaga

Wulan Ramdani^{1*}, Putri Adhelya², Satrio Nugroho Pamungkas³, Sinan Al'Mufadhfhfal Assariy⁴, Siti Ashry Aliana⁵, Cinta Ismaniar⁶, Nawala Kaisya Putri⁷, Abdul Warist Masri⁸, Sabina Putri⁹, Ananda Shafly¹⁰, Heavy Nala Estriani¹¹, Valencia Husni¹²

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} Universitas Mataram

*Corresponding Author

E-mail: lenterayatra@gmail.com (Wulan Ramdani)*

Article History:

Received: Nov, 2025

Revised: Nov, 2025

Accepted: Nov, 2025

Abstract: *Tingginya angka pekerja migran dari Desa Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menimbulkan berbagai persoalan, seperti maraknya percaloan, tingginya keberangkatan non-prosedural, rendahnya literasi migrasi, serta minimnya kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola migrasi aman. Padahal, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menempatkan desa sebagai ujung tombak perlindungan pekerja migran. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek perlindungan migran ke dalam kebijakan desa melalui workshop yang melibatkan perangkat desa, calon pekerja migran, rekruter lokal, dan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi perencanaan dan penganggaran desa yang responsif migran, pelatihan literasi finansial dan digitalisasi remitansi, penyampaian materi mengenai zero cost recruitment, serta penyusunan Logbook integrasi isu migrasi ke dalam kebijakan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai tata kelola migrasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko pungutan ilegal, serta tersusunnya Logbook sebagai instrumen praktis untuk pendataan, perencanaan, dan monitoring migrasi di tingkat desa. Integrasi perlindungan migran ke dalam RPJMDes dan RKPDes menjadi rekomendasi utama agar Desa Suralaga mampu membangun sistem migrasi aman yang berkelanjutan.*

Keywords:

Kebijakan Desa; Literasi Migrasi; Pekerja Migran; Suralaga; Zero Cost

Pendahuluan

Desa Suralaga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah penyumbang pekerja migran terbanyak di antara daerah lainnya. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan para penduduk desa Suralaga memilih untuk bekerja di luar negeri demi mencukupi kehidupan keluarga di desa.

Seiring berjalannya waktu penduduk desa lebih banyak memilih untuk bekerja di luar negeri dibandingkan di daerah asal. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pekerja migran yang semakin banyak dan menciptakan celah baru untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan tersebut ¹.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur tahun 2020, Desa Suralaga memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.614 jiwa, terdiri dari 778 laki-laki dan 836 perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 485 jiwa yang ter data sebagai Pekerja Migran Indonesia, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari data tersebut dapat dilihat sebanyak 485 jiwa warga desa Suralaga menjadi Pekerja Migran Indonesia, sehingga remitansi yang mereka kirimkan memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan desa. Dana remitansi tersebut dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga kebutuhan sehari-hari lebih mudah terpenuhi tanpa harus bergantung pada hasil pertanian ataupun usaha lokal yang ada di desa ².

Terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan calon pekerja migran untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan bekerja sebagai calo atau sponsor. Calo/sponsor bagi calon pekerja migran sangatlah penting karena dari mereka para calon pekerja migran mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang merekrut, persyaratan yang dibutuhkan, serta proses perekrutan. Selain itu juga calo dapat membantu mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia. terdapat beberapa oknum calo yang memberangkatkan pekerja migran tidak melalui jalur resmi atau *unprocedural* yang menyebabkan para pekerja migran menjadi pekerja migran *illegal*. Hingga saat ini banyak pekerja migran yang berangkat secara *illegal* ³.

Sebagian besar para calon pekerja migran hanya menjalani pendidikan sampai sekolah menengah dan juga kurang literasi mengenai syarat dan ketentuan yang dibutuhkan. Calo yang memanfaatkan kesempatan tersebut menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan baru dan tidak sedikit juga calo yang mematok biaya besar untuk membantu proses pendaftaran calon pekerja migran. Biaya yang besar ini membuat calon pekerja migran memerlukan pinjaman lebih untuk menutupi biaya tersebut yang kemudian akan menjadi masalah baru di kemudian hari ⁴.

Fenomena mengenai calo dan biaya pendaftaran yang sangat besar ini menjadi tugas penting pemerintahan untuk segera mengatasinya. Beberapa pihak pemerintahan dan juga organisasi non pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengadakan sosialisasi atau literasi bagi para calon pekerja migran mengenai biaya yang diperlukan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB terus melakukan

¹ Hamdi et al., "Strategi Pemerintah Membantu Pekerja Migran Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur."

² Inderasari, Hamdi, and Maulana, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Suralaga Lombok Timur."

³ Seftiani et al., "Peran Kelembagaan Lokal Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani."

⁴ Muyasaroh, "Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap Pada Saat Rekrutmen."

peningkatan pelayanan demi mengurangi risiko pekerja migran yang berangkat secara *unprocedural*. Disnakertrans juga menyediakan berbagai informasi perusahaan perekrut untuk para calon pekerja migran untuk mengurangi intervensi calo ⁵.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) juga melakukan berbagai macam upaya untuk memberikan literasi mengenai informasi, persyaratan, hak-hak pekerja migran, kontrak kerja, pembuatan visa dan paspor serta biaya yang diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan keberangkatan calon pekerja migran. Upaya yang dilakukan oleh BP3MI melalui program kerja sosialisasi dan literasi mengenai *zero cost* ⁶. BP3MI bekerja sama dengan beberapa NGO atau *event* untuk mengadakan sosialisasi seperti dengan *Migrant Care*. Dalam penulisan laporan akhir pengabdian ini, kelompok PMD Lentera Yatra bekerja sama dengan BP3MI untuk mengadakan sosialisasi mengenai program *zero cost* bagi para calon pekerja migran yang akan bekerja di sektor sawit Malaysia.

Permasalahan pekerja migran di Desa Suralaga tidak hanya pada banyaknya calo, namun jalur ilegal, rendahnya literasi masyarakat, serta lemahnya peran desa dalam tata kelola pekerja migran juga menjadi masalah utama di Desa Suralaga. Jalur ilegal masih sering dipilih calon pekerja migran karena proses yang singkat, biaya lebih murah, dan memiliki kekuatan lebih dari calo atau sponsor yang bergerak bebas di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berangkat tanpa dokumen resmi. Rendahnya literasi masyarakat dari berbagai aspek juga membuat para calon pekerja migran tidak memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga para calon pekerja migran tersebut rentan mengalami eksploitasi di negara tujuannya. Permasalahan ini diperkuat dengan lemahnya peran desa ⁷. Secara normatif sudah jelas tertulis pada UU no. 18 tahun 2017 yang menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam perlindungan pekerja migran, terlebih lagi dalam hal pendataan, pemberian rekomendasi, penyediaan informasi serta pengawasan awal. Namun, di Desa Suralaga peran tersebut belum dapat dimaksimalkan karena keterbatasan kapasitas, kurangnya anggaran, dan minimnya sinergi antara pemerintah desa dengan lembaga yang terkait pekerja migran ⁸.

Integrasi perlindungan pekerja migran harus ada dalam kebijakan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan isu migrasi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa perlu memasukkan program perlindungan pekerja migran dalam dokumen RPJMDes dan RKPDDes, sehingga

⁵ Erlin et al., "Zero Unprocedural Sebuah Program Kemudahan Yang Diberikan Disnakertrans Bagi Calon Pmi Di Ntb."

⁶ Taria Hasna Setyawulandari and Satino, "Zero Cost Policy for Indonesian Migrant Workers in Taiwan Case Study Based Employment Agreement Law Number 18 of 2017."

⁷ Wahyudi et al., "Improving Literacy of the Mechanism for Placing Indonesian Migrant Workers as Efforts to Address Undocumented Migrants in East Lombok."

⁸ Marbun, Husni Abdul Jalil, and Teuku Surya Reza, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Masalah Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia."

kebijakan dan anggaran desa bisa diarahkan untuk mendukung layanan informasi migran, sosialisasi prosedur resmi, serta pengawasan terhadap sponsor ilegal. Selain itu, desa dapat membentuk unit pelayanan yang terhubung dengan sistem nasional seperti BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar warga memiliki akses informasi yang jelas sejak tahap awal keberangkatan hingga kepulangan. Desa juga bisa mengembangkan peraturan desa (Perdes) tentang tata kelola pekerja migran, misalnya kewajiban pencatatan calon migran di kantor desa dan mekanisme sanksi sosial terhadap praktik percaloan. Di sisi pemberdayaan, integrasi kebijakan dapat diwujudkan melalui program pelatihan kewirausahaan, pengelolaan remitansi, dan penguatan kelompok usaha keluarga migran agar keberangkatan tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi⁹. Dengan mengintegrasikan perlindungan pekerja migran dalam kebijakan desa, Desa Suralaga dapat berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pencegahan jalur ilegal, peningkatan literasi warga, serta penguatan perlindungan sosial-ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya.

Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian Masyarakat di Desa Suralaga, Kecamatan Lombok Timur dilaksanakan melalui metode *workshop* atau pelatihan yang dirancang secara bertahap agar mudah dipahami dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat serta perangkat desa. *Workshop* ini menekankan isu pekerja migran, mulai dari pengelolaan kebijakan desa, perencanaan anggaran hingga literasi melalui digitalisasi remitansi.

Tahap awal *workshop* dilakukan melalui sosialisasi tentang Pengelolaan Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Desa yang Responsif Terhadap Kebutuhan Pekerja Migran. Pada sesi ini, tim pengabdian bekerja sama dengan UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang pentingnya mengintegrasikan isu migrasi ke dalam dokumen perencanaan dan per anggaran desa. Hal ini sejalan dengan praktik perencanaan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pekerja migran dan keluarganya¹⁰. Integrasi isu migrasi ke dalam perencanaan desa juga sejalan dengan SDGs poin 16, yaitu pembangunan institusi yang adil, transparan, dan tangguh¹¹.

Kegiatan dilanjutkan dengan *workshop* penguatan kapasitas kelembagaan desa, di mana perangkat desa dan masyarakat diberikan materi terkait strategi pengelolaan isu migrasi. Pada tahap ini, contoh isu yang dibahas adalah pengelolaan remitansi keluarga pekerja migran, bukan semata-mata dalam kerangka literasi finansial, tetapi lebih pada bagaimana desa dapat menyiapkan

⁹ Aditya, "Penyuluhan Optimalisasi Peran Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Di Desa Mangunweni Kabupaten Kebumen."

¹⁰ Mansur et al., "Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes."

¹¹ SDGS, "Goals 16, Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels."

kebijakan pendukung serta regulasi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, remitansi diposisikan sebagai salah satu aspek kebijakan desa, bukan hanya persoalan teknis rumah tangga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa remitansi cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan investasi jangka panjang¹². Oleh karena itu, peserta *workshop* diberikan materi oleh narasumber yang berkompeten dalam bidang literasi finansial, khususnya terkait strategi perencanaan keuangan keluarga, teknik pengelolaan anggaran rumah tangga, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk pengelolaan remitansi.

Dalam sesi praktik, peserta didorong untuk melakukan aktif simulasi kebijakan, di mana peserta diajak untuk melakukan identifikasi tantangan dan peluang, misalnya keterbatasan akses teknologi digital dalam pengelolaan remitansi, serta merumuskan solusi kebijakan yang dapat diakomodasi dalam regulasi desa. Proses ini memperkuat peran UNDP dalam mendampingi desa merumuskan strategi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk keluarga pekerja migran.

Selanjutnya, perangkat desa dan tim pengabdian menyusun rancangan tindak lanjut, misalnya modul literasi keuangan desa dan kebijakan desa tentang pekerja migran dengan mekanisme *monitoring* yang terintegrasi dengan agenda pembangunan desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan remitansi, tetapi lebih luas lagi pada penguatan kapasitas desa dalam rangka mencapai target SDGs melalui dukungan dan kolaborasi aktif dengan UNDP.

Rangkaian workshop yang dilakukan tersebut, menjadi metode yang dipilih guna memberi pemahaman secara langsung kepada masyarakat yang dibersamai dengan pemberian materi oleh pihak-pihak yang sangat relevan di bidangnya. Pengelolaan kebijakan perencanaan anggaran terhadap migran menjadi salah satu hal yang penting untuk disosialisasikan, mengingat masih cukup sedikit desa yang telah mengaplikasikan hal tersebut ke dalam regulasi desanya, dengan demikian tidak hanya masyarakat, pemerintah desa juga akan mendapatkan dampak dari kegiatan tersebut. Melalui serangkaian *workshop* tersebut diharapkan Masyarakat Desa Suralaga dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas mereka dalam mengelola kebijakan migrasi, memanfaatkan secara bijak, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga migran.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi integrasi aspek perlindungan migran dalam kebijakan desa dilaksanakan di Desa Suralaga sebagai mitra program pengabdian pada masyarakat. Sasaran kegiatan adalah perangkat desa, calon pekerja migran, rekruter lokal, serta masyarakat umum yang berkaitan dengan isu migrasi. Tujuan utama

¹² Juddi, Perbawasari, and Zubair, "Financial Literacy Improvement Program for Indonesian ExMigrant Workers and Families."

kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya tata kelola migrasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan melalui kebijakan desa, sehingga masyarakat mampu memahami hak-haknya sebagai pekerja migran dan tidak lagi bergantung pada praktik rekrutmen ilegal. Kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan dari perangkat desa Suralaga yang menyampaikan gambaran umum permasalahan pekerja migran di tingkat desa. Dalam kesempatan tersebut, perangkat desa menekankan perlunya perusahaan perekrut (PT) memiliki legalitas yang jelas, termasuk dokumen resmi yang diserahkan di kantor desa, serta kewajiban pendampingan terhadap calon pekerja migran. Hal ini didasari pengalaman bahwa selama ini desa sering menjadi pihak yang harus menyelesaikan permasalahan migran karena ketiadaan peran langsung dari pihak PT.



Gambar 1. Sambutan Perangkat Desa Suralaga pada Kegiatan Sosialisasi

Tahap berikutnya, dilakukan penyampaian materi oleh dosen selaku perwakilan UNDP mengenai Panduan Teknis Integrasi Isu Migrasi ke dalam Kebijakan Desa. Materi ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mengarusutamakan isu migrasi ke dalam dokumen perencanaan, anggaran, dan kebijakan desa, sebagaimana telah disusun dalam Panduan Teknis UNDP–Kemendagri 2024. Dalam penjelasannya, ditekankan bahwa perlindungan migran tidak hanya terkait perekrutan, tetapi juga mencakup pendataan, edukasi pra-keberangkatan, serta pemberdayaan pekerja migran purna.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Dosen Perwakilan UNDP Mengenai Panduan Teknis Integrasi Migrasi

Selanjutnya, tim pengabdian bersama Center for Village Innovation (CVI) menyampaikan materi mengenai skema *zero cost* dan praktik rekrutmen resmi, khususnya di sektor perkebunan sawit Malaysia. Materi ini menyoroti kenyataan di lapangan bahwa meskipun skema *zero cost* berlaku, masih terdapat calon pekerja migran yang diminta membayar sejumlah uang oleh rekruter. Diskusi dengan peserta mengungkapkan adanya variasi pungutan biaya yang tidak sesuai ketentuan, sehingga menegaskan pentingnya literasi migrasi agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh CVI

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama peserta. Salah seorang calon pekerja migran mengaku telah membayar Rp2 juta untuk biaya keberangkatan, sementara rekruter lokal mengungkapkan adanya variasi *fee* dari PT. Diskusi ini membuka kesadaran masyarakat bahwa praktik pungutan tersebut sebenarnya tidak sesuai aturan dan menyalahi prinsip *zero cost*. Peserta diajak memahami bahwa migrasi aman tidak identik dengan proses cepat, tetapi harus sesuai prosedur resmi.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan, tim pengabdian menghasilkan *Logbook* integrasi isu migrasi ke dalam kebijakan desa. *Logbook* ini berfungsi sebagai instrumen praktis bagi pemerintah desa untuk mendokumentasikan langkah-langkah integrasi migrasi dalam RPJMDes, RKPDDes, maupun regulasi desa lainnya. Pada penutupan kegiatan, *Logbook* tersebut secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa Suralaga untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan pekerja migran di tingkat desa.



Gambar 4 Penyerahan *Logbook* Integrasi Migrasi kepada Kepala Desa Suralaga

Logbook yang disusun dalam kegiatan pengabdian ini berfungsi sebagai instrumen praktis yang dapat digunakan pemerintah desa dalam merancang dan mengevaluasi program terkait pekerja migran. Di dalam *Logbook* tercantum beberapa komponen utama, seperti pendataan calon pekerja migran, mekanisme verifikasi legalitas dokumen keberangkatan, pencatatan biaya yang dikeluarkan, serta identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen. Selain itu, *Logbook* ini juga memuat panduan teknis tentang bagaimana desa dapat mengintegrasikan isu migrasi ke dalam RPJMDes dan RKPDes, sehingga perlindungan migran tidak hanya bersifat insidental, melainkan terencana dan berkesinambungan. Penyusunan *Logbook* ini mengacu pada *Panduan Teknis Integrasi Isu Migrasi* yang dikembangkan oleh UNDP bersama Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024. Panduan tersebut menekankan bahwa desa memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam perlindungan pekerja migran, terutama karena proses awal perekrutan hampir selalu terjadi di tingkat desa. Dengan adanya *Logbook*, perangkat desa dapat lebih mudah melakukan pencatatan dan pelaporan, serta memastikan bahwa setiap langkah migrasi tercatat secara administratif sesuai regulasi yang berlaku.

Keberadaan *Logbook* juga memberikan ruang bagi desa untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi internal. Misalnya, desa dapat mengidentifikasi jumlah calon pekerja migran yang berangkat setiap tahun, berapa banyak yang difasilitasi melalui jalur resmi, serta persoalan apa saja yang muncul selama proses keberangkatan hingga kepulangan. Data-data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tingkat desa. Lebih jauh, *Logbook* ini juga menjadi pintu masuk bagi desa untuk membangun sinergi dengan lembaga lain, seperti BP3MI, Dinas Tenaga Kerja, maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan migran. Dengan dokumentasi yang rapi, desa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam advokasi kebijakan, sekaligus dapat mengakses program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah maupun mitra pembangunan.

Penyerahan *Logbook* kepada Kepala Desa Suralaga pada akhir kegiatan sosialisasi menjadi simbol komitmen bersama antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menjadikan isu migrasi sebagai bagian integral dari

pembangunan desa. Dengan adanya *Logbook* ini, diharapkan Desa Suralaga tidak hanya mampu meminimalisir praktik rekrutmen ilegal dan pungutan liar, tetapi juga dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi pekerja migran purna yang telah kembali ke desa. Kegiatan kemudian ditutup dengan penegasan bahwa perlindungan pekerja migran harus mencakup tiga tahapan utama, yaitu pra-keberangkatan, saat bekerja, dan pasca kepulangan. Pada tahap pra-keberangkatan, masyarakat perlu memperoleh edukasi mengenai prosedur resmi dan transparansi biaya. Pada tahap bekerja, akses informasi pengaduan serta pemantauan kesehatan pekerja migran sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko eksploitasi. Sedangkan pada tahap pasca kepulangan, pekerja migran purna dapat diberdayakan melalui UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta pengelolaan remitansi produktif. Melalui sosialisasi dan *Logbook* yang telah disusun, Desa Suralaga diharapkan mampu menjadi *one stop centre* layanan migrasi aman yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan kebijakan desa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Suralaga menunjukkan bahwa permasalahan pekerja migran di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan maraknya praktik percaloan dan keberangkatan non-prosedural, tetapi juga berakar pada rendahnya literasi migrasi serta belum optimalnya kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan peran perlindungan sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 18 Tahun 2017. Melalui rangkaian *workshop*, sosialisasi, dan pendampingan yang melibatkan perangkat desa, calon pekerja migran, rekruter lokal, serta mitra seperti UNDP dan CVI, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi aman dan pentingnya mengikuti prosedur resmi, termasuk penerapan skema *zero cost*. Penyusunan dan penyerahan *Logbook* integrasi isu migrasi menjadi salah satu capaian penting, karena menyediakan instrumen praktis bagi desa untuk melakukan pendataan, *monitoring*, dan perencanaan kebijakan secara lebih terstruktur. Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa integrasi perlindungan migran ke dalam kebijakan dan perencanaan desa merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola migrasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Desa Suralaga.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan, pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan *Logbook* yang telah disusun sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola migrasi dan mengintegrasikan isu pekerja migran secara berkesinambungan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Desa juga perlu memperluas kerja sama dengan BP3MI, Disnaker, serta lembaga non-pemerintah agar mekanisme pengawasan, sosialisasi prosedur resmi, dan pendampingan terhadap calon pekerja migran dapat dilakukan secara lebih konsisten. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai migrasi aman dan manajemen keuangan perlu terus dilakukan, khususnya bagi keluarga migran dan mereka yang berisiko

terjebak pungutan ilegal. Upaya pemberdayaan ekonomi pekerja migran purna melalui pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan remitansi produktif juga penting untuk diperkuat agar keberangkatan ke luar negeri tidak hanya menjadi pilihan karena desakan ekonomi. Dengan memadukan kebijakan desa yang responsif, edukasi berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga, Desa Suralaga dapat membangun sistem perlindungan migran yang lebih kuat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakatnya.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Suralaga atas dukungan, partisipasi, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan Center for Village Innovation (CVI) yang telah memberikan materi, pendampingan, serta kontribusi signifikan dalam penyusunan *Logbook* integrasi isu migrasi. Terima kasih pula kepada BP3MI, Dinas Tenaga Kerja, para rekruter lokal, serta masyarakat Desa Suralaga yang turut berpartisipasi aktif dalam *workshop* dan diskusi. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh anggota tim Lentera Yatra atas kerja sama dan dedikasi dalam menyelesaikan program ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi penguatan tata kelola migrasi di Desa Suralaga dan menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan migran yang lebih baik.

Daftar Referensi

- Aditya, Maulana. "Penyuluhan Optimalisasi Peran Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Di Desa Mangunweni Kabupaten Kebumen." *Bagelen 2*, no. 1 (2024): 57–63.
- Erlin, Erlin, Lisa Andriani, Nurmaya Nurmaya, and Muhammad Rahmatul Burhan. "Zero Unprocedural Sebuah Program Kemudahan Yang Diberikan Disnakertrans Bagi Calon Pmi Di Ntb." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS 2*, no. 3 (2024): 833–41. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i3.801>.
- Hamdi, Saipul, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Indrasari, and Ega Erlina. "Strategi Pemerintah Membantu Pekerja Migran Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Di Suralaga, Lombok Timur." *Jurnal Kebijakan Pembangunan 17*, no. 2 (2022): 185–98. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.289>.
- Inderasari, O P, S Hamdi, and I Maulana. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Suralaga Lombok Timur." *Jurnal Kebijakan ... 17* (2022): 91–105. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.256>.
- Juddi, Moh Faidol, Susie Perbawasari, and Feliza Zubair. "Financial Literacy Improvement Program for Indonesian ExMigrant Workers and Families." *Library Philosophy and Practice 2020*, no. May (2020).
- Mansur, Andi Guntang, Andi Muhammad Idhan, Yulpan Kadir, and Muten Nuna. "Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo VIII*, no. 2 (2021): 349–62.
- Marbun, Khairun Umma Marbun, Husni Abdul Jalil, and Teuku Surya Reza. "Perlindungan Hukum

- Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Masalah Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *As-Siyadah* 4, no. 2 (2024): 1–26. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v4i2.5387>.
- Muyasaroh, Hanifah. "Model Komunikasi Interpersonal Sponsor Dengan Calon Pekerja Migran Kabupaten Cilacap Pada Saat Rekrutmen." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- SDGS. "Goals 16, Promote Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development, Provide Access to Justice for All and Build Effective, Accountable and Inclusive Institutions at All Levels." United Nations, 2025.
- Seftiani, Sari, Deshinta Vibriyanti, Vanda Ningrum, Inayah Hidayati, and Luh Kitty Katherina. "Peran Kelembagaan Lokal Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 2 (2024): 369–81. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.77739>.
- Taria Hasna Setyawulandari, and Satino Satino. "Zero Cost Policy for Indonesian Migrant Workers in Taiwan Case Study Based Employment Agreement Law Number 18 of 2017." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1275–84. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.488>.
- Wahyudi, Irfan, Rachmah Ida, Endah Kinasih, Dimas Ramadhiansyah, Edyna Putri, Fortuna - Peningkatan Literasi, Mekanisme ... 86, et al. "Improving Literacy of the Mechanism for Placing Indonesian Migrant Workers as Efforts to Address Undocumented Migrants in East Lombok" 12, no. 2 (2023): 86–94.